KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 988/KPTUN.W2-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul /Prima (*Indonesia Court Performance Excellent-ICPE*) perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
b. bahwa dalam mengantasipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b dipandang perlu membentuk Tim dan Penetapan Sistem Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN SISTEM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I kolom II dengan tugas pokok dan wewenang dalam lampiran I kolom IV keputusan ini sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Tim Manajemen Resiko di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai berikut :

Ketua : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Sekretaris :
- Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang Kepaniteraan;
- Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim Manajemen dalam bidang Kesekretariatan;

Anggota :
- Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat memengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- Menetapkan kriteria akibat masing-masing resiko yang mungkin terjadi;
- Menetapkan kriteria akibat terjadinya masing-masing resiko;
- Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan resiko;

Ketiga : Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Keempat : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari;

Kelima : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam dattar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku;

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Acc 20/7/26

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Menetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 988/KPTUN.W2-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA TIM
3	SANDI KURNIAWAN, S.H.	HAKIM	WAKIL KETUA TIM
4	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.	PANITERA	SEKRETARIS KEPANITERAAN
5	PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.	SEKRETARIS	SEKRETARIS KESEKRETARIATAN
6	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.	HAKIM	ANGGOTA
7	SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.	HAKIM	ANGGOTA
8	PRASETYO NUGROHO, S.H., M.H.	HAKIM	ANGGOTA
9	NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H.	HAKIM	ANGGOTA
10	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H.	PANITERA MUDA PERKARA	ANGGOTA
11	DEBORA S ANDUWACU, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
12	DORTJE PETRONELA BIRE, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
13	JOSEP KLAU, S.H., M.H.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
14	ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos.	KEPALA SUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 988/KPTUN.W2-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

MATRIKS RISIKO

Instansi Pemerintah : Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

No	Identifikasi Risiko		Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
	Penyebab	Dampak		
A. Majelis Hakim				
1	Akibat tidak diterimanya dan diperiksanya berkas perkara gugatan dan permohonan sesuai waktu yang ditetapkan	Keterlambatan dalam pelayanan persidangan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pelayanan persidangan
2	Akibat tidak ditetapkannya hari sidang pemeriksaan persiapan untuk acara biasa dan tidak menginputnya melalui Aplikasi SIPP	Tidak terlaksananya sidang pemeriksaan persiapan untuk acara biasa dan tidak terinputnya dalam Aplikasi SIPP	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya sidang pemeriksaan persiapan untuk acara biasa dan terinputnya dalam Aplikasi SIPP
3	Akibat tidak ditetapkannya hari sidang terbuka untuk umum dan tidak diinputnya dalam SIPP serta tidak adanya court callender untuk perkara permohonan	Tidak terlaksananya persidangan yang terbuka umum, tidak ada informasi perkara dalam SIPP	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya persidangan yang terbuka umum, terdapat data informasi perkara dalam SIPP
4	Akibat tidak dilaksanakannya proses pemeriksaan persiapan dan persidangan	Tidak berjalannya persidangan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Berjalannya persidangan
5	Akibat tidak dilaksanakannya proses pemeriksaan persiapan dan persidangan	Tidak berjalannya persidangan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Berjalannya persidangan

Akibat ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6	Akibat tidak ditandatangani dan tidak dipelajarinya berita acara persidangan	Keterlambatan dalam minutasi perkara	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tepat waktunya proses minutasi perkara
7	Akibat tidak dibuatnya konsep putusan	Tidak adanya putusan pengadilan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselesaikannya putusan pengadilan
8	Akibat tidak ditandatanganinya putusan pengadilan	Tidak sahnya sebuah putusan pengadilan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Putusan pengadilan dapat tersampaikan kepada para pihak
9	Akibat tidak terselesaikannya persidangan dan minutasi sesuai SOP	Keterlambatan proses beracara dan minutasi	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya proses beracara dan minutasi
10	Akibat tidak dilaksanakannya tugas lain yang ditunjuk pimpinan	Terhambatnya kegiatan lainnya sebagaimana penunjukan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya kegiatan lainnya sebagaimana penunjukan

No	**Identifikasi Risiko**		**Mitigasi Risiko**	**Hasil Penerapan Mitigasi Risiko**
	Penyebab	**Dampak**		
B. Panitera Pengganti				
1	Akibat tidak dilaksanakannya proses persidangan	Persidangan mengalami penundaan atau penggantian panitera pengganti	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pelayanan persidangan
2	Akibat tidak dibuatnya berita acara persidangan	Keterlambatan proses beracara dan minutasi	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya proses beracara dan minutasi secara tepat waktu
3	Akibat menginputnya data perkara melalui Aplikasi SIPP	Tidak terinputnya dalam Aplikasi SIPP yang menyebabkan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terinputnya dalam Aplikasi SIPP, data perkara sesuai

data ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

		data perkara tidak cocok		
4	Akibat tidak dibuatnya surat panggilan sidang dan penundaan sidang	Tidak diketahuinya jadwal persidangan berikutnya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Jadwal persidangan berikutnya dapat diagendakan
5	Akibat tidak dilaksanakannya proses pengetikan putusan	Pembacaan putusan hanya dibacakan atas konsep tanpa hasil ketikan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Berjalannya persidangan Pembacaan Putusan
6	Akibat tidak disampaikannya pemberitahuan atas putusan	Pihak berperkara tidak mengetahui putusan dimaksud	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Para Pihak mengetahui isi Putusan
7	Akibat tidak dilaksanakannya proses minutasi	Tidak tertibnya berkas perkara	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tertibnya pemberkasan perkara

No	Identifikasi Risiko		Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
	Penyebab	Dampak		
C. Kepaniteraan Muda Perkara				
1	Akibat tidak dilaksanakannya penerimaan dan pendaftaran gugatan sesuai prosedur	Keterlambatan pemberian Nomor Perkara dan Persidangan Selanjutnya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya Penomoran Perkara
2	Akibat tidak diprosesnya pencabutan gugatan	Persidangan masih berjalan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Agenda persidangan sudah berhenti
3	Akibat tidak dilaksanakannya penerimaan dan pendaftaran gugatan KIP sesuai prosedur	Keterlambatan pemberian Nomor Perkara dan Persidangan Selanjutnya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya Penomoran Perkara

Akibat ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

4	Akibat tidak dilaksanakannya penerimaan gugatan Permohonan sesuai prosedur	Keterlambatan pemberian Nomor Perkara dan Persidangan Selanjutnya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya Penomoran Perkara
5	Akibat tidak dilaksanakannya pendaftaran gugatan Permohonan sesuai prosedur	Keterlambatan pemberian Nomor Perkara dan Persidangan Selanjutnya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya Penomoran Perkara
6	Akibat tidak dikelolanya register	Kekosongan Buku Register	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya pengisian Buku Register
7	Akibat tidak dikelolanya register	Kekosongan Buku Register	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya pengisian Buku Register
8	Akibat tidak disistribusikannya berkas perkara	Persidangan Pemeriksaan Persiapan akan mengalami keterlambatan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya Persidangan Pemeriksaan Persiapan
9	Akibat tidak dikelolanya register	Kekosongan Buku Register	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tersedianya Buku Register yang sudah diisi
10	Akibat keterlambatan prosedural penerimaan dan pendaftaran banding	Keterlambatan pengiriman berkas banding	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman berkas banding
11	Akibat keterlambatan prosedural penerimaan memori dan kontra memori banding	Keterlambatan pengiriman berkas banding	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman berkas banding

Akibat ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

12	Akibat keterlambatan pengiriman berkas banding	Keterlambatan penomoran perkara banding	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman berkas banding
13	Akibat keterlambatan pemberitahuan pencabutan banding	Proses upaya hukum banding masih berjalan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselesaikannya upaya hukum banding
14	Akibat tidak disampaikannya amar putusan	Pihak berperkara tidak mengetahui amar putusan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Pihak berperkara mendapatkan amar putusan
15	Akibat tidak dikelolanya register	Kekosongan Buku Register	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tersedianya Buku Register yang sudah diisi
16	Akibat keterlambatan prosedural penerimaan dan pendaftaran kasasi	Keterlambatan pengiriman berkas kasasi	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman berkas kasasi
17	Akibat keterlambatan prosedural penerimaan memori dan kontra memori kasasi	Keterlambatan pengiriman berkas kasasi	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman berkas kasasi
18	Akibat keterlambatan pengiriman berkas kasasi	Keterlambatan penomoran perkara kasasi	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman berkas kasasi
19	Akibat keterlambatan pemberitahuan pencabutan kasasi	Proses upaya hukum kasasi masih berjalan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselesaikannya upaya hukum kasasi
20	Akibat keterlambatan prosedural	Keterlambatan pengiriman berkas PK	Menerapkan SOP dan memberlakukan	Terselenggaranya pengiriman berkas Peninjauan Kembali

penerimaan ..

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	penerimaan dan pendaftaran PK		punishment dan reward	
21	Akibat keterlambatan prosedural penerimaan memori dan kontra memori PK	Keterlambatan pengiriman berkas PK	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman berkas Peninjauan Kembali
22	Akibat keterlambatan pengiriman berkas PK	Keterlambatan penomoran perkara PK	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman berkas Peninjauan Kembali
23	Akibat keterlambatan pemberitahuan pencabutan PK	Proses upaya hukum PK masih berjalan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselesaikannya upaya hukum peninjauan kembali
24	Akibat keterlambatan prosedural penerimaan dan pendaftaran Eksekusi	Keterlambatan pembuatan surat penetapan eksekusi	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tersedianya surat penetapan eksekusi
25	Akibat tidak dibuatnya penetapan eksekusi	Proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya proses eksekusi
26	Akibat tidak tertibnya arsip berkas perkara	Tidak terkelolanya arsip berkas perkara	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terkelolanya arsip berkas perkara
27	Akibat tidak tercatatnya surat masuk dalam register surat	Tidak tertibnya pengelolaan surat masuk	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tertibnya pengelolaan surat masuk
28	Akibat tidak tercatatnya surat keluar dalam register surat	Tidak tertibnya pengelolaan surat keluar	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	tertibnya pengelolaan surat keluar
29	Akibat tidak terakomodasikann	Tidak terakomodasikann	Menerapkan SOP dan	Terakomodasikann ya pelaksanaan

ya ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	ya anggaran untuk pembebasan biaya perkara	ya pelaksanaan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu	memberlakukan punishment dan reward	pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu
30	Akibat prosedural pengembalian sisa panjar tidak dilaksanakan dengan baik	Adanya biaya perkara yang masih bersisa di kasir	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselesaikannya administrasi keuangan perkara

No	**Identifikasi Risiko**		**Mitigasi Risiko**	**Hasil Penerapan Mitigasi Risiko**
	Penyebab	**Dampak**		
D. Kepaniteraan Muda Hukum				
1	Akibat tidak terkelolanya surat masuk dalam register surat masuk	Tidak tertibnya pengelolaan surat masuk	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tertibnya pengelolaan surat masuk
2	Akibat tidak terkelolanya Surat Kuasa Khusus	Tidak tertibnya berkas administrasi persidangan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tertibnya berkas administrasi persidangan
3	Akibat tidak terkelolanya Surat Kuasa Insidentil	Tidak tertibnya berkas administrasi persidangan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tertibnya berkas administrasi persidangan
4	Akibat tidak terkelola dengan baik penataan berkas in aktif	Menyulitkan dalam pencarian berkas	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Kemudahan dalam pencarian berkas
5	Akibat tidak terkelola dengan baik penyampaian informasi	Minimnya informasi yang disampaikan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terdapatnya informasi yang dapat disampaikan
6	Akibat tidak berfungsinya pelayanan pengaduan	Terhambatnya penanganan pengaduan masyarakat	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat

Akibat ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

7	Akibat keterlambatan pembuatan laporan tahunan	Terlambatnya pengiriman laporan tahunan yang disampaikan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Pengiriman laporan tahunan yang disampaikan tepat waktu
8	Akibat tidak terkelolanya surat keluar dalam register surat	Tidak tertibnya pengelolaan surat keluar	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tertibnya pengelolaan surat keluar
9	Akibat keterlambatan pembuatan laporan Bulanan	Terlambatnya pengiriman laporan bulanan yang disampaikan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Pengiriman laporan bulanan yang disampaikan tepat waktu
10	Akibat keterlambatan pembuatan laporan Catur Wulan	Terlambatnya pengiriman laporan catur wulan yang disampaikan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Pengiriman laporan catur wulan yang disampaikan tepat waktu
11	Akibat keterlambatan pembuatan laporan Triwulan	Terlambatnya pengiriman laporan triwulan yang disampaikan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Pengiriman laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
12	Akibat keterlambatan pembuatan laporan Semesteran	Terlambatnya pengiriman laporan semesteran yang disampaikan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Pengiriman laporan semesteran yang disampaikan tepat waktu
13	Akibat tidak dikelola dengan baik pengelolaan surat keterangan	Produk surat keterangan dimaksud tidak terbentuk	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya proses pembuatan surat keterangan

No	**Identifikasi Risiko**		**Mitigasi Risiko**	**Hasil Penerapan Mitigasi Risiko**
	Penyebab	**Dampak**		
E. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana				
1	Akibat tidak diusulkannya Nama Calon Peserta Diklat Pendidikan dan	Perwakilan peserta dari satuan kerja tidak ada	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya Diklat Pendidikan dan pelatihan bagi Hakim dan Pegawai

pelatihan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	pelatihan bagi Hakim dan Pegawai			
2	Akibat keterlambatan usulan KGB	Tidak adanya kenaikan gaji pokok hakim dan pegawai	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tersedianya surat kenaikan gaji pokok hakim dan pegawai
3	Akibat tidak dilengkapinya berkas usulan promosi jabatan	Panitia seleksi/baperjakat mengalami kesulitan dalam mengevaluasi usulan promosi	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya Baperjakat dan terdapatnya usulan promosi jabatan
4	Akibat keterlambatan memproses surat dinas dan surat tugas	Pelaksanaan tupoksi menjadi terhambat	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya tupoksi secara tepat waktu
5	Akibat tidak update nya data sikep	Data base kepegawaian hakim dan ASN tidak update	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Update-nya data base kepegawaian hakim dan ASN
6	Akibat tidak dibuat dan dikirimnya Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat	Kesulitan dalam penyusunan Kenaikan Pangkat	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselesaikannya dan kemudahan dalam penyusunan kenaikan pangkat
7	Akibat keterlambatan pengiriman berkas Kenaikan Pangkat	Kesulitan dalam penyusunan Kenaikan Pangkat Otomatis	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya proses kenaikan pangkat
8	Akibat tidak dibuatnya laporan bulanan kehadiran Hakim dan ASN	Tidak tertibnya Tupoksi, kedisiplinan dan mekanisme pelaporan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tertibnya tupoksi, kedisiplinan dan mekanisme pelaporan

Akibat ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

9	Akibat tidak disusunnya DUK	Data urutan kepangkatan tidak tergambarkan secara visual	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Visualisasi data urutan kepangkatan tergambarkan jelas
10	Akibat tidak diprosesnya permohonan cuti	Hakim dan ASN tidak dapat menjalankan hak cuti	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya proses cuti Hakim dan ASN
11	Akibat tidak lengkapnya surat keputusan ketua pengadilan	Kurangnya sumber hukum internal satuan kerja	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terdapatnya sumber hukum internal satuan kerja
12	Akibat tidak dilengkapinya SPMJ dan SPMMJ	Kurangnya data dukung data base kepegawaian baik hard copy dan soft copy	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	terdapatnya data dukung / data base kepegawaian baik hard copy dan soft copy
13	Akibat tidak dibuatnya target SKP	Tidak dapat dilakukan evaluasi SKP ataupun Penilaian SKP Akhir Tahun	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terevaluasi SKP / Penilaian SKP Akhir Tahun
14	Akibat tidak dibuatnya Penilaian SKP	Tidak lengkapnya data penunjang utama kepegawaian	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya data penunjang kepegawaian
15	Akibat keterlambatan penyusunan laporan bulanan	Keterlambatan pengiriman laporan bulanan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya proses pengiriman laporan bulanan
16	Akibat tidak dikelola nya pelaksanaan pelaporan E-LHKAN	Pengadilan/satuan kerja memiliki citra buruk dalam pelaporan harta kekayaan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Pengadilan/satuan kerja memiliki citra yang baik dalam pelaporan harta kekayaan
17	Akibat tidak tersusunnya SOP satuan kerja	Setiap bidang melaksanakan tugas tanpa petunjuk dan tanpa dasar	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Setiap bidang dapat melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan dasar hukum yang terstruktur

hukum ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		hukum yang terstruktur		
18	Akibat tidak dikelolanya acara kedinasan	Pelaksanaan kegiatan kedinasan beresiko tanpa acuan yang jelas dan berdiri sendiri	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya kegiatan kedinasan sesuai acuan yang jelas

No	**Identifikasi Risiko**		**Mitigasi Risiko**	**Hasil Penerapan Mitigasi Risiko**
	Penyebab	**Dampak**		
F. Sub Bagian Umum dan Keuangan				
1	Akibat tidak terkelolanya surat masuk dalam register surat masuk	Tidak tertibnya pengelolaan surat masuk	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tertibnya pengelolaan surat masuk
2	Akibat tidak terkelolanya surat keluar dalam register surat	Tidak tertibnya pengelolaan surat keluar	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tertibnya pengelolaan surat keluar
3	Akibat tidak dilaksanakannya proses pengadaan dan pendistribusian ATK dan ART dengan sesuai ketentuan	ATK dan ART tidak terpenuhi dan tidak terbagi sesuai kebutuhan bidang	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terpenuhinya ATK dan ART dan terbagi sesuai kebutuhan bidang
4	Akibat tidak dilakukan nya opname fisik persediaan dan pencatatan dalam aplikasi persediaan	ATK dan ART tidak akan diketahui sisa dan ukuran kekurangannya, ATK dan ART tidak ada pembukuannya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya opname fisik persediaan dan tertibnya pembukuan persediaan
5	Akibat tidak dilakukannya kontrol terkait keamanan dan kebersihan kantor	Lingkungan kantor akan mengalami kemunduran dari segi kebersihan dan keamanannya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Peningakatan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor

BMN ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6	Akibat tidak dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan BMN	BMN akan mengalami kondisi Rusak Berat yang berimplikasi pada penghapusan BMN	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terawatnya BMN satuan kerja
7	Akibat tidak terkelolanya buku-buku perpustakaan dengan baik	Tidak terdatanya buku-buku perpustakaan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terdatanya buku perpustakaan secara baik
8	Akibat tidak dilaksanakannya proses pengadaan barang jasa sesuai aturan	Tidak adanya data kontrak setiap pengadaan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terdapatnya data kontrak setiap pengadaan
9	Akibat tidak dilakukan koordinasi terkait kehumasan	Tidak adanya informasi dengan badan/institusi lain	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya kegiatan kehumasan
10	Akibat tidak dilakukannya kegiatan penghapusan BMN	BMN yang berkondisi rusak berat akan selalu menumpuk di gudang	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya kegiatan proses penghapusan
11	Akibat keterlambatan penyusunan dan pembuatan laporan tahunan atau semester	Terlambatnya pengiriman laporan tahunan/semester dimaksud ke jenjang berikutnya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman laporan tahunan/semester
12	Akibat tidak dilakukannya koordinasi terkait penerimaan tamu	Tamu akan mendapatkan pelayanan yang kurang berkenan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terakomodirnya tamu dalam hal pelayanan prima
13	Akibat dari tidak dimonitornya dan dievaluasinya terkait pengunjung sidang	Pengunjung sidang akan mengalami kebingungan dan hal hal negatif yang diluar prediksi dapat muncul	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Kemudahan pengunjung sidang mendapatkan informasi dan layanan

Akibat ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

14	Akibat tidak terkelola dengan baik sistem penggajian Hakim dan Pegawai	Memungkinkan terjadinya keterlambatan pembayaran gaji	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pembayaran gaji hakim dan pegawai secara tepat waktu
15	Akibat dari keterlambatan pembayaran uang makan	Memungkinkan terjdinya konflik internal	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terhindarnya konflik internal sebagai bentuk dampak terselesaikannya pencairan uang makan tepat waktu
16	Akibat dari keterlambatanusulan pengajuan remunerasi	Remunerasi akan mengalami keterlambatan penerimaan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terbayarkannya tunjangan kinerja aparatur secara tepat waktu
17	Akibat tidak dikelolanya manajemen uang persediaan	Memunculkan pengeluaran fiktif	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengelolaan uang persediaan yang dipertanggung-jawabkan
18	Akibat keterlambatan permohonan GUP	Kantor tidak memiliki uang persediaan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tersedianya uang persediaan satuan kerja
19	Akibat keterlambatan pembayaran LS	Memunculkan denda yang ditanggung satker	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pembayaran secara LS yang tepat waktu dan akuntabel
20	Akibat tidak dikelolanya PNBP dengan baik	Tata kelola PNBP dan manajemen PNBP tidak terkontrol	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya dan terkontrolnya tata kelola PNBP
21	Akibat terlambatnya laporan LPJ	Satuan kerja mengalami kerugian tidak dapat melaksanakan Ganti Uang Persediaan (GUP)	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya laporan LPJ yang tepat waktu

Tata ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

22	Akibat keterlambatan laporan LRA	Tata kelola keuangan dan manajemen keuangan tidak memunculkan nilai resapan anggaran	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya laporan LRA yang tepat waktu
23	Akibat tidak dilaksanakannya penginputan data keuangan	Kesulitan dalam melakukan laporan keuangan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya input data keuangan dalam aplikasi keuangan
24	Akibat tidak dilaksanakannya penginputan data keuangan dalam aplikasi Tk. Wilayah	Kesulitan dalam melakukan laporan keuangan Tk Wilayah	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya input data keuangan dalam aplikasi keuangan Tk. Wilayah.

No	**Identifikasi Risiko**		**Mitigasi Risiko**	**Hasil Penerapan Mitigasi Risiko**
	Penyebab	**Dampak**		
G. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan				
1	Akibat tidak disusunnya rencana Kerja Anggaran	Satuan kerja tidak memiliki porsi anggaran untuk tahun mendatang	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terdapatnya porsi anggaran tahun mendatang yang dapat direalisasikan satuan kerja
2	Akibat tidak terbarukannya data website	Informasi web yang disajikan tidak update	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Update-nya Informasi web yang disajikan
3	Akibat tidak terkelolanya dengan baik data dokumentasi dan informasi	Tidak adanya dokumentasi kegiatan satuan kerja	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pendokumentasi kegiatan satuan kerja
4	Akibat tidak dilaksanakannya monitoring aplikasi perkantoran dan pengelolaan server	Aplikasi kantor tidak mengalami update data base dan kapasitas server tidak terkontrol	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Update-nya Aplikasi kantor dan tersedianya data base yang terkontrol

Pelayanan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5	Akibat tidak terkelolanya jaringan internet	Pelayanan informasi dan pelaporan yang bersifat IT terhambat dan bahkan tidak berjalan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya penyampaian informasi dan pelaporan yang bersifat IT
6	Akibat tidak dilakukannya sinkronisasi data base terutama pada SIPP	Validitas data perkara diragukan kesesuainnya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Tervalidasinya data perkara yang dapat dipertanggung-jawabkan
7	Akibat tidak terkelolanya dengan baik Informasi Data Perkara	Validitas data perkara diragukan kesesuainnya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Kesesuaian data perkara manual dan digital
8	Akibat tidak dilakukannya monitoring dan sinkronisasi data SIPP	Validitas data perkara diragukan kesesuainnya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terlaksananya kegiatan monitoring dan sinkronisasi data SIPP
9	Akibat keterlambatan penyusunan laporan bulanan	Keterlambatan pengiriman laporan bulanan	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman laporan bulanan
10	Akibat keterlambatan penyusunan dan pembuatan laporan tahunan, LKJIP dan SAKIP	Terlambatnya pengiriman laporan tahunan dimaksud ke jenjang berikutnya	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya pengiriman laporan tahunan
11	Akibat tidak disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja	Satuan kerja tidak memiliki time schedulle penyelesaian Tupoksi	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terdapatnya rencana kerja satuan kerja yang dapat dipertanggung-jawabkan

No	**Identifikasi Risiko**		**Mitigasi Risiko**	**Hasil Penerapan Mitigasi Risiko**
	Penyebab	**Dampak**		
H. Jurusita Pengganti				
1	Akibat tidak dilaksanakannya	Tidak terlaksananya	Menerapkan SOP dan	Terselenggaranya proses

panggilan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	panggilan persidangan kepada para pihak	persidangan sebagaimana court calender	memberlakukan punishment dan reward	persidangan dan panggilan persidangan
2	Akibat tidak dilaksanakannya kegiatan mengawal jalannya persidangan	Persidangan tidak berjalan dengan lancar	Menerapkan SOP dan memberlakukan punishment dan reward	Terselenggaranya proses persidangan secara tertib dan sesuai waktu dan tempat sidang yang diagendakan

MATRIKS RISIKO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Identifikasi risiko menggambarkan risiko terkait proses bisnis utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan;
2. Peningkatan Kualitas Kerja, dan;
3. Peningkatan Integritas

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
1	Penyelesaian perkara tidak tepat waktu.	1. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS); 2. Tertib melaksanakan persidangan sesuai Court Calender yang telah ditetapkan sehingga mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 3. Membuat laporan apabila perkara tidak diselesaikan tepat waktu (SE MA Nomor 2 Tahun 2014)	Seluruh perkara dapat diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama).
2	Penyampaian salinan putusan kepada para pihak tidak tepat waktu.	1. Monitoring penyampaian salinan putusan kepada para pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP); 2. Monitoring Ketua Pengadilan terhadap Kepaniteraan secara berkala (sekurang-kurangnya sebulan sekali)	Penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu.
3	Pelaksanaan Eksekusi yang terhambat.	1. Melakukan pengawasan (Monev) secara berkala terhadap pelaksanaan Eksekusi untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi; 2. Optimalisasi aplikasi MONEKSTUN.	Pelaksanaan Eksekusi dapat diselesaikan dengan baik.
4	Keterlambatan pengiriman berkas upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali).	1. Melakukan monitoring pelaksanaan minutasi perkara setelah pengucapan putusan; 2. Melakukan monitoring pengiriman berkas perkara yang mengajukan upaya hukum.	Pengiriman berkas upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) secara tepat waktu.
5	Permohonan Informasi dan Pengaduan yang tidak direspon.	1. Menunjuk Petugas Informasi sebagai renspon awal	Seluruh permohonan informasi dan pengaduan

permohonan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		permohonan informasi dari pemphon informasi; 2. Menunjuk Humas satuan kerja; 3. Membentuk Tim Pengaduan untuk merespon pengaduan dengan berpedoman pada Pedoman Penanganan Pengaduan; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian informasi dan penanganan penganduan secara berkala.	direspon dan diselesaikan dengan baik.
6	Pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak sesuai SOP.	1. Penanggungjawab PTSP melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap pemberian layanan oleh PTSP agar sesuai dengan (SOP); 2. Memberikan kompensasi pelayanan kepada pengguna layanan apabila layanan tidak selesai tepat waktu.	Pemberian layanan pada PTSP sesuai SOP.
7	Pemberian layanan dengan membedakan orang/golongan tertentu termasuk kaum rentan	1. Menyusun pedoman standar layanan yang mengakomodir bahwa layanan pengadilan dilakukan secara adil dan seimbang kepada semua pengguna layanan termasuk kaum rentan; 2. Memberikan briefing secara rutin kepada petugas layanan agar pemberian layanan dilakukan dengan baik tanpa membedakan apapun; 3. Melaksanakan *in house training* layanan dengan mengundang pihak luar sebagai narasumber.	Pemberian layanan dilakukan secara adil terhadap semua Pengguna Layanan
8	Menerima tips dalam memberikan layanan.	1. Membuat pedoman standar layanan yang mengatur bahwa tidak diperbolehkan menerima/meminta tips terhadap layanan yang diberikan; 2. Membuat banner, spanduk, himbauan baik melalui audio atau media lainnya agar tidak memberikan tips, Gratifikasi, Pungli atau ajakan untuk tidak Korupsi.	Layanan dilakukan dengan berpedoman pada standar layanan yang berlaku.
9	Pemanfaatan zona streril yang belum maksimal	1. Membuat pedoman mengenai tata cara penerimaan tamu; 2. Memperketat pemanfaatan zona steril dan melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait zona steril; 3. Memisahkan area kantin dan mushala terpisah bagi pegawai dan para pihak (masyarakat); 4. Internalisasi secara berkala terkait zona steril dan zona publik kepada seluruh pegawai agar mentaati ketentuan yang telah ditetapkan.	Seluruh pelayanan dilaksanakan sesuai dengan saran dan prasarana yang telah disediakan, sehingga mampu mencegah adanya pertemuan yang berpotensi melanggar prinsip integritas.
10	Upaya penyuapan pada saat proses pengadaan barang/jasa.	1. Menyusun pedoman mengenai penanganan gratifikasi terutama terhadap kegiatan yang berpotensi terjadi penyuapan;	Proses pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		2. Proses pengadaan melalui aplikasi SPSE; 3. Memperkuat fungsi pengawasan internal.	
11	Kekeliruan dalam pemberian layanan informasi publik kepada Pemohon Informasi.	1. Melakukan sosialisasi terhadap implementasi SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022; 2. Membuat pedoman standar pelayanan informasi publik di satuan kerja.	Pelayanan pemberian informasi publik kepada Pemohon Informasi dilakukan secara benar.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN